



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

LAPORAN KEUANGAN (Audited)

5°15'25,580"S 112°33'11,8"

SANAN

-3°15'45,564"S 112°32'39,474"E

SUNTARIAH

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2024

- ❖ *Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023*
- ❖ *Neraca untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023*
- ❖ *Laporan Operasional untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023*
- ❖ *Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023*
- ❖ *Catatan atas Laporan Keuangan*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan APBD yang dipimpinnya.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Seruyan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan serta telah dilakukan audit dan pemeriksaan oleh BPK RI melalui Laporan Keuangan Kabupaten Seruyan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberi informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada APBD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kuala Pembuang, 25 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan



ABDUL RAJAK, S.Pi., M.M
NIP. 19720513 200604 1 020

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	4
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	5
2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	5
2.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET DANREALISASI BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	15
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	16
3.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	16
3.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	21
3.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	33
3.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	36
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	37
4.1 GAMBARAN ORGANISASI	37
4.2 INDIKATOR KINERJA	44
4.3 PROGRAM/KEGIATAN	46
BAB V PENUTUP	48
LAMPIRAN DAN DAFTAR	



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan Mohammad Hatta No. 05 Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telepon . (0538) 2022472 Fax. (0538) 2022472

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

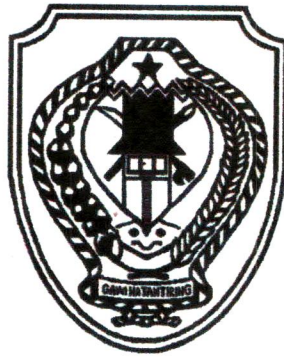
Kuala Pembuang, 25 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas



ABDUL RAJAK, S.Pi., M.M

NIP. 19720513 200604 1 020



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024
AUDITED**

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SERUYAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN**

**SKPD : 1.03.2.01. - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN
PERTANAHAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2024 dan
2023**

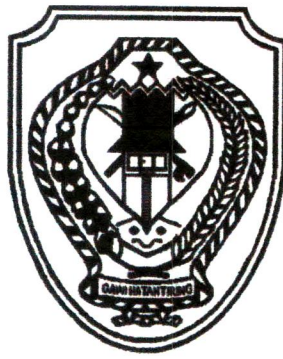
Dalam Rupiah

Uraian	Reff	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1		2	3	4	5
BELANJA	3.1.2	11.457.655.744	10.834.271.835,92	94,56	11.729.381.388
BELANJA OPERASI	3.1.2.1	10.070.873.800	9.498.019.333,00	94,31	10.584.917.388
Belanja Pegawai	3.1.2.1.1	4.433.202.104	4.342.947.628,00	97,96	3.986.555.845
Belanja Gaji dan Tunjangan		2.381.503.644,00	2.361.442.438,00	99,16	2.324.933.619
Belanja Tambahan Penghasilan PNS		1.875.046.460,00	1.822.235.190,00	97,18	1.510.599.226
Honorarium PNS		176.652.000,00	159.270.000,00	90,16	151.023.000
Belanja Barang dan Jasa	3.1.2.1.2	3.717.671.696,00	3.270.071.705,00	87,96	3.614.198.796
Belanja Barang		915.252.800,00	776.766.300,00	84,87	695.895.000
Belanja Jasa		800.334.896,00	614.111.391,00	76,73	628.420.693
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				32,44	2.525.308
Belanja Pemeliharaan		189.610.000,00	168.257.000,00	88,74	198.876.000
Belanja Perjalanan Dinas		1.812.474.000,00	1.710.937.014,00	94,40	1.719.156.542
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis					98.500.000
Belanja Bantuan Sosial	3.1.2.1.3	1.920.000.000,00	1.885.000.000,00	98,18	3.254.988.000
Belanja Bansos kepada Individu		355.000.000,00	320.000.000,00	90,14	
Belanja Bansos kepada Keluarga		1.565.000.000,00	1.565.000.000,00	100	
JUMLAH BELANJA OPERASI		10.070.873.800,00	9.498.019.333,00	94,31	10.584.917.388
BELANJA MODAL	3.1.2.2	1.386.781.944,00	1.336.252.502,92	96,36	1.144.464.000
Belanja Modal Tanah	3.1.2.2.1	-	-		-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.1.2.2.2	799.713.400,00	751.680.000,00	93,99	1.066.552.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.1.2.2.3				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.1.2.2.4	487.068.544,00	485.572.502,92	99,69	76.812.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.1.2.2.5	1.500.000	1.100.000	73,33	1.100.000
Belanja Modal Aset Lainnya		100.000.000,00	99.000.000,00	99,00	
JUMLAH BELANJA MODAL		1.386.781.944,00	1.336.252.502,92	96,36	1.144.464.000
JUMLAH BELANJA		11.457.655.744,00	10.834.271.835,92	94,56	11.729.381.388
SURPLUS/(DEFISIT)		(11.457.655.744,00)	(10.834.271.835,92)	94,56	(11.729.381.388)

Kuala Pembuang, 25 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan


ABDUL RAJAK, S.Pi., M.M
NIP. 19720513 200604 1 020



**NERACA
TAHUN ANGGARAN 2024
AUDITED**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SERUYAN 2025**

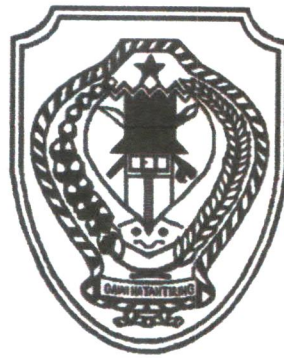
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Reff	JUMLAH	
			2024	2023
1	ASET	3.3.1		
2	ASET LANCAR	3.2.1.1		
3	Kas di Bendahara Penerimaan	3.2.1.1.2	-	
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.2.1.1.3	-	-
5	Piutang Retribusi Daerah			
6	Beban Dibayar Dimuka	3.2.1.1.4	5.723.866,30	
7	Persediaan	3.2.1.1.5	3.758.500,00	2.047.000,00
8	Jumlah Aset lancar		9.482.366,30	2.047.000,00
9	ASET TETAP	3.2.1.3		
10	Tanah	3.2.1.3.1	112.267.500,00	112.267.500,00
11	Peralatan dan Mesin	3.2.1.3.2	3.865.927.065,34	3.790.120.732,00
12	Gedung dan Bangunan	3.2.1.3.3	5.621.681.174,00	5.621.681.174,00
13	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.2.1.3.4	39.076.060.228,92	37.749.647.800,00
14	Aset Tetap Lainnya	3.2.1.3.5	3.658.897.450,00	3.658.897.450,00
15	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.2.1.3.6	1.372.985.916,00	1.372.985.916,00
16	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	3.2.1.3.7	(26.908.207.477,34)	(23.705.018.113)
17	Jumlah Aset Tetap		27.429.611.856,92	28.600.582.459
18	ASET LAINNYA	3.2.1.4		
20	Tagihan Penjualan Angsuran	3.2.1.4.1		
21	Tuntutan Ganti Rugi			
22	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
23	Aset Tidak Berwujud	3.2.1.4.2	99.000.000,00	
24	Aset Lain-lain	3.2.1.4.3	848.567.416,66	1.431.793.500
	Akumulasi Penyusutan aset lainnya	3.2.1.4.4	(798.931.100,66)	(1.374.151.517)
25	Akumulasi Amortisasi	3.2.1.4.5	(330.000,00)	0
26	Jumlah Aset Lainnya		148.306.316,00	57.641.983,00
27	JUMLAH ASET		27.587.400.539,22	28.660.271.442
28	KEWAJIBAN	3.2.2		
29	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.2.2.1		
30	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.2.2.1.1		
31	Belanja di bayar Dimuka	3.2.2.1.2		
32	Utang Belanja	3.2.2.1.3	699.050,00	396.545,00
33	Utang Jangka Pendek lainnya	3.2.2.1.4		
34	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		699.050,00	396.545,00
35	JUMLAH KEWAJIBAN		699.050,00	396.545,00
36	EKUITAS	3.2.3		
38	EKUITAS			
39	Ekuitas		16.752.429.653,30	28.659.874.897
40	Ekuitas untuk di konsolidasikan		10.834.271.835,92	
41	JUMLAH EKUITAS		27.586.701.498,22	31.259.127.189
42	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27.587.400.539,22	31.259.248.363

Kuala Pembuang, 25 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan


ABDUL RAJAK, S.PL., M.M
NIP. 19720513 200604 1 020



**LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
AUDITED**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SERUYAN 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN LAPORAN
OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 DAN 2023

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	1.470.839.926,00	0,00	1.470.839.926,00	100,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-	1.470.839.926,00	0,00	1.470.839.926,00	100,00
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	1.470.839.926,00	0,00	1.470.839.926,00	100,00
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	1.470.839.926,00	0,00	1.470.839.926,00	100,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	1.470.839.926,00	0,00	1.470.839.926,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.470.839.926,00	0,00	1.470.839.926,00	100,00
8	BEBAN	13.370.035.169,70	14.328.633.680,0	(958.598.510,30)	(6,69)
8.1	BEBAN OPERASI	9.506.091.471,70	10.586.689.683,0	(1.080.598.211,30)	(10,21)
8.1.01	Beban Pegawai	4.342.947.628,00	3.986.555.845,00	356.391.783,00	8,94
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.361.442.438,00	2.324.933.619,00	36.508.819,00	1,57
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.822.235.190,00	1.510.599.226,00	311.635.964,00	20,63
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	159.270.000,00	151.023.000,00	8.247.000,00	5,46
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.278.143.843,70	3.345.145.838,00	(67.001.994,30)	(2,00)
8.1.02.01	Beban Barang	790.259.800,00	696.317.000,00	93.942.800,00	13,49
8.1.02.02	Beban Jasa	608.690.029,70	730.796.296,00	(122.106.266,30)	(16,71)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	168.257.000,00	198.876.000,00	(30.619.000,00)	(15,40)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.710.937.014,00	1.719.156.542,00	(8.219.528,00)	(0,48)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	1.885.000.000,00	3.254.988.000,00	(1.369.988.000,00)	(42,09)
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	320.000.000,00	739.988.000,00	(419.988.000,00)	(56,76)
8.1.06.02	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	1.565.000.000,00	2.515.000.000,00	(950.000.000,00)	(37,77)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	9.506.091.471,70	10.586.689.683,0	(1.080.598.211,30)	(10,21)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.863.943.698,00	3.741.943.997,00	121.999.701,00	3,26
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	409.946.490,00	279.874.301,00	129.072.189,00	46,12
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	106.135.500,00	106.135.500,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.347.531.708,00	3.355.934.196,00	(7.402.488,00)	(0,22)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN	3.863.943.698,00	3.741.943.997,00	121.999.701,00	3,26
	JUMLAH BEBAN	13.370.035.169,70	14.328.633.680,0	(958.598.510,30)	(6,69)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.899.195.243,70)	(14.328.633.680,00)	2.429.438.436,30	(16,96)

Kuala Pempuang, 25 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan


ABDUL RAJAK, S.PI. M.M
NIP. 19720513 200604 1 020

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	Reff	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	3.4.1	28.659.874.897,00	31.259.127.189
2	SURPLUS/DEFISIT LO	3.4.2	(11.899.195.243,70)	(14.328.633.680)
	RK PPKD	3.4.3	10.834.271.835,92	11.729.381.388,00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	3.4.4		
4	KOREKSI NILAI ASET TETAP			
	- Mutasi Aset dari SKPD ke RSUD			
	- Mutasi Aset dari RSUD ke SKPD			
	- Pengurangan nilai aset tetap			
	- Mutasi dari Barang jasa ke asset Tetap			
5	LAIN-LAIN	3.4.5	(8.250.000,00)	
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN		1.235.644.750,00	
	ASET RUSAK BERAT/USANG		(1.243.894.750,00)	
11	EKUITAS AKHIR	3.4.6	27.586.701.489,22	28.659.874.897,00

Kuala Pembuang, 25 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan



ABDUL RAJAK, S.Pi., M.M
NIP. 19720513 200604 1 020



BAB V PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

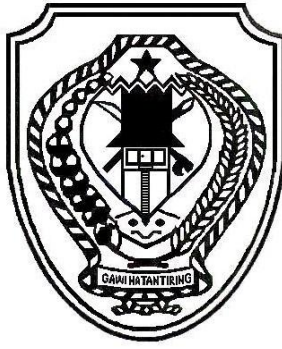
1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas;
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan dan sekaligus sebagai bahan untuk dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Pembuang, 25 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan


ABDUL RAJAK, S.Pi., M.M
NIP. 19720513 200604 1 020



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SERUYAN 2025**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan yang disajikan bagi pengguna informasi keuangan daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan disusun berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan dibuat untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas akuntansi, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Laporan Keuangan bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan TA 2024 disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah,
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



- o. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 95) ;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2024 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99)
- s. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- t. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 2);
- u. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024;.
- v. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024;
- w. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024;
- x. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024



1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Bab IV Penjelasan atas Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Penjelasan Neraca
- 4.3. Penjelasan Laporan Operasional
- 4.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V Penjelasan atas informasi non keuangan

- 5.1. Gambaran Organisasi
- 5.2. Indikator Kinerja
- 5.3. Program/Kegiatan

Bab VI Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pada bagian ini akan disajikan analisa capaian kinerja keuangan yang digambarkan dalam ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan secara keseluruhan sebagai akuntabilitas keuangan terhadap capaian indikator dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

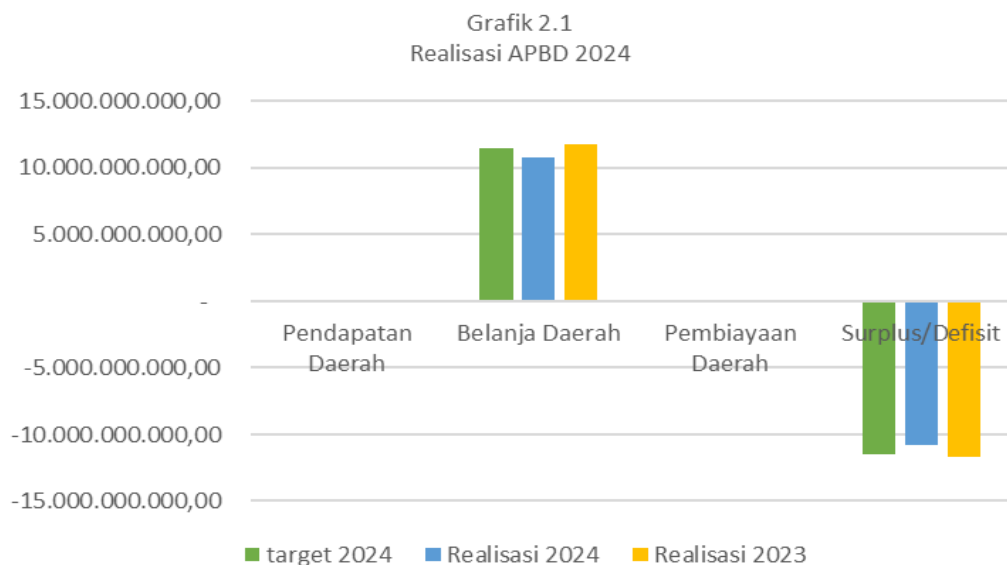
Dari gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tergambar pada Pencapaian /Realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang trsaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi APBD tahun 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi TA 2023
		Target	Realisasi	%	
1	Pendapatan Daerah	0	0	0	0
2	Belanja Daerah	11.457.655.744,00	10.834.271.835,92	94,56	11.729.381.388,00
3	Pembiayaan Daerah	0	0	0	0
4	Surplus/Defisit	(11.457.655.744,00)	(10.834.271.835,92)	94,56	(11.729.381.388)





2.1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Belanja

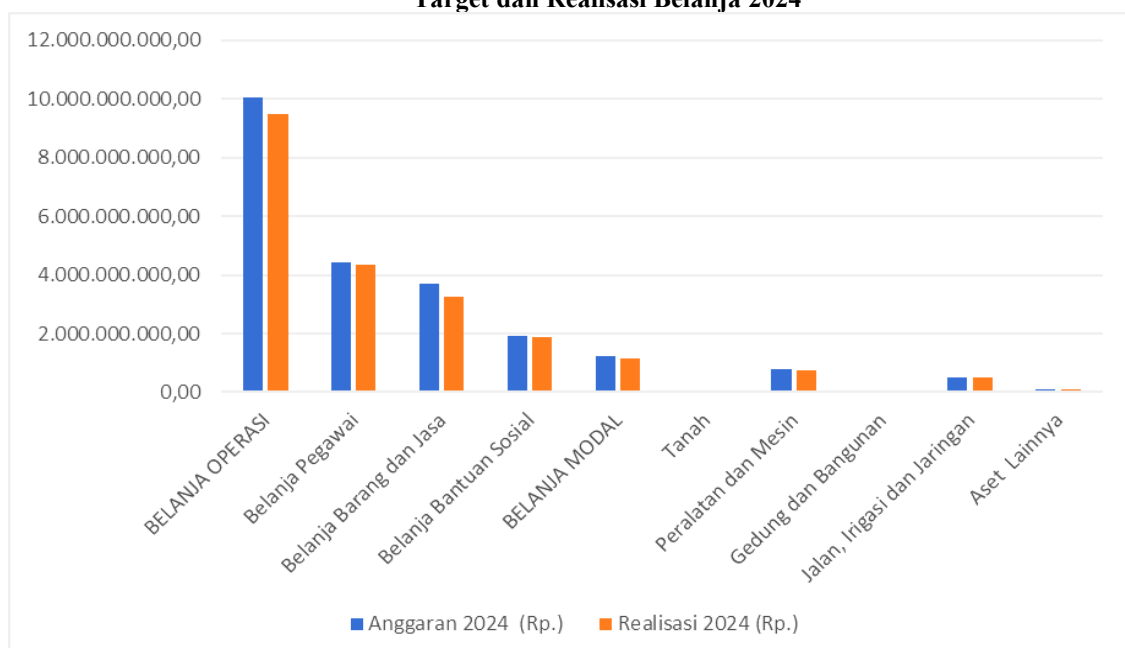
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 tidak menetapkan target pendapatan dengan kata lain tidak terdapat sumber sumber pendapatan yang dapat digali pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Belanja terealisasi sebesar Rp 10.834.271.1.729.385,92 dari anggaran sebesar Rp 11.457.271.744,00 atau terealisasi sebesar 94,56%. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 1.336.252.502,92 atau 96,36% dari anggaran belanja modal sebesar Rp 1.386.781.944,00. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp 9.498.019.333,00 atau 94,31 % dari anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 10.070.873.800,00.

Belanja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat diuraikan pada table dibawah ini :

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1	Belanja Operasi	10.070.873.800,00	9.498.019.333,00	94,31
5.1.01	Belanja Pegawai	4.433.202.104,00	4.342.947.628,00	97,96
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.717.671.696,00	3.270.071.705,00	87,96
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.920.000.000,00	1.885.000.000,00	99,99
5.2	Belanja Modal	1.249.982.000,00	1.144.464.000,00	98,18
5.2.01	Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Peralatan dan Mesin	799.713.400,00	751.680.000,00	93,99
5.2.03	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	487.068.544,00	485.572.502,92	99,69
5.2.05	Aset Lainnya	100.000.000,00	99.000.000,00	99,00
JUMLAH BELANJA		11.457.655.744,00	10.834.271.835,92	94,56

Grafik 2.2
Target dan Realisasi Belanja 2024





2.1.2 Ikhtisar Pencapaian Per Sub Kegiatan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 melaksanakan 9 Program 18 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan Anggaran Rp 11.457.655.744,00 dengan Realisasi sebesar Rp 10.834.271.835,92 atau sebesar 94,54%. Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan telah berupaya melaksanakan kegiatan agar dapat pencapaian indikator kinerja selaras dengan capaian realisasi keuangan. Pada pelaksanaan kegiatan ada beberapa hal yang menyebabkan tidak maksimalnya realisasi keuangan tersebut yang berdampak pada tidak terpenihinya realisasi capaian diatas 70 persen

Berikut Realisasi pencapaian target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai upaya pencapaian Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan :



Tabel 2.1.2
Rincian Realisasi per Program Kegiatan dan Sub kegiatan TA 2023

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran	Penjelasan Singkat Atas Realisasi Pendapatan dan Belanja (Tidak Optimal, Melampaui Target, Kurang Optimal, Tidak Terealisasi)
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Total	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	238.086.000	0	136.430.912,00	99.000.000,00 0	286.515.172,00	98,69	2.655.088,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36.132.000,00	0	35.412.660,00	0	35.412.660,00	98,01	719.340,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.852.000,00		13.421.600,00		13.421.600,00	96,89	430.400,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.284.450.104,00	4.211.577.628,00	0	0	4.211.577.628,00	98,30	72.872.476,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.843.000,00		10.032.350,00		10.032.350,00	84,71	1.810.650,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.384.000,00	0	8.915.800,00	0	8.915.800,00	61,98	5.468.200,00 0	Sub Kegiatan dilaksanakan kurang optimal sesuai target dan realisasi tidak maksimal dikarenakan tidak ada kepastian ketersediaan anggaran PAD dan DBH sampai bulan Desember
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								



*Catatan Atas Laporan Keuangan Disperkimtan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran	Penjelasan Singkat Atas Realisasi Pendapatan dan Belanja (Tidak Optimal, Melampaui Target, Kurang Optimal, Tidak Terealisasi)
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Total	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	174.057.900,00		162.135.000,00		162.135.000,00	93,15	11.922.900,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target ada satu belanja yang tidak dapat direalisasikan mengingat belum ada kepastian ketersediaan anggaran
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	19.362.000,00	0	17.872.700,00	0	17.872.700,00	92,31	1.489.300,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.128.750,00		5.125.000,00		5.125.000,00	99,93	3.750,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	225.497.000,00	0	193.039.426,00	0	193.039.426,00	85,61	32.457.574,00	Sub Kegiatan dilaksanakan kurang optimal sesuai target dikarenakan banyak kegiatan bimtek yang diikuti tidak menggunakan biaya kontribusi dan anggaran PAD belum tersedia sampai dengan bulan Desember
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.239.100,00	0	10.230.000,00	0	10.230.000,00	99,91	9.100,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.395.600,00	0	113.238.650,00	0	113.238.650,00	99,86	156.950,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.500.000,00	0	12.485.050,00		12.485.050,00	99,88	14.950,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	177.148.200,00	0	177.110.850,00	0	177.110.850,00	99,98	37.350,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.690.000,00	0	41.650.000,00	0	41.650.000,00	99,90	40.000,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.400.000,00	0	10.560.000,00	,00	10.560.000,00	85,16	1.840.000,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Penyediaan Bahan/Material	24.382.750,00		22.840.000,00		22.840.000,00	93,67	1.542.750,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target



*Catatan Atas Laporan Keuangan Disperkimtan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran	Penjelasan Singkat Atas Realisasi Pendapatan dan Belanja (Tidak Optimal, Melampaui Target, Kurang Optimal, Tidak Terealisasi)
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Total	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	384.054.000,00	0	363.104.054,00	0	363.104.054,00	94,55	20.949.946,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	419.672.000,00			376.000.000,00	376.000.000,00	89,59	43.672.000,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target sisa anggaran dikarenakan adanya kelebihan nilai pengadaan dan tidak dapat digunakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.650.400,00	0	,00	198.840.000,00	198.840.000,00	99,10	1.810.400,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.300.000,00	0	14.300.000,00	0	14.300.000,00	100	0	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.004.360,00	0	92.572.496,00	0	92.572.496,00	94,46	5.431.864,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	563.932.536,00	98.527.500,00	317.764.280,00	0	512.860.440,00	90,94	51.072.096,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target. Sisa anggaran dikarenakan adanya TKD yang merengsurkan diri dan pengurangan nilai
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224.133.900,00	0	169.533.205,00	0	169.533.205,00	75,64	54.600.695,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target. Sisa Anggaran adalah perbaikan kendaraan roda empat yang tidak terealisasi akibat perbaikan di Banjarmasin karena kecelakaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.620.000,00	0	62.570.000,00	0	62.570.000,00	99,92	50.000,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target



*Catatan Atas Laporan Keuangan Disperkimtan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran	Penjelasan Singkat Atas Realisasi Pendapatan dan Belanja (Tidak Optimal, Melampaui Target, Kurang Optimal, Tidak Terealisasi)
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Total	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.500.000,00	0	45.756.000,00	0	45.756.000,00	98,40	744.000,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>								
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	21.204.000,00	0	21.203.325,00	0	21.203.325,00	100,00	675,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	23.754.000,00		23.687.000,00		23.687.000,00	99,72	67.000,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>								
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	94.948.000,00	0	94.898.500,00	0	94.898.500,00	99,95	49.500,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	406.399.000,00	0	403.273.500,00	51.450.000,00	454.723.500,00	99,92	323.600,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	30.328.000,00	0	29.274.902,00	0	29.274.902,00	96,53	1.053.098,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>								



*Catatan Atas Laporan Keuangan Disperkimtan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran	Penjelasan Singkat Atas Realisasi Pendapatan dan Belanja (Tidak Optimal, Melampaui Target, Kurang Optimal, Tidak Terealisasi)
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Total	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	584.331.000,00	0	573.018.678,00	0	573.018.678,00	98,06	11.312.322,00	
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.348.644.000,00		1.260.934.500,00	47.700.000,00	1.308.634.500,00	97,03	40.009.500,00	Sub Kegiatan dilaksanakan kurang optimal sesuai target. dikarenakan adanya ketidakpastian dana pada BKAD sehingga evaluasi dan Pemeriksaan akhir tidak dapat dilaksanakan
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	277.670.600,00	0	121.911.889	77.690.000,00	199.601.889,00	71,88	78.068.711,00	Sub Kegiatan dilaksanakan kurang optimal sesuai target. dikarenakan adanya ketidakpastian dana pada BKAD sehingga evaluasi dan Pemeriksaan akhir tidak dapat dilaksanakan
Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	58.524.000,00		49.171.547,00		49.171.547,00	84,02	9.352.453,00	Sub Kegiatan dilaksanakan kurang optimal sesuai target. dikarenakan adanya ketidakpastian dana pada BKAD sehingga evaluasi dan Pemeriksaan akhir tidak dapat dilaksanakan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								



*Catatan Atas Laporan Keuangan Disperkimtan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran	Penjelasan Singkat Atas Realisasi Pendapatan dan Belanja (Tidak Optimal, Melampaui Target, Kurang Optimal, Tidak Terealisasi)
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Total	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	651.545.544,00		115.337.900,00	485.572.502,92	600.910.402,92	92,23	50.635.141,08	Sub Kegiatan ini dilaksanakan optimal sesuai target. Sisa anggaran adalah sisa kontrak dan pelaksanaan SPPD yang tidak terealisasi
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.								
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	19.861.000,00	0	19.502.600,00	0	19.502.600,00	98,20	358.400,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.909.000,00		19.283.700,00		19.283.700,00	96,86	625.300,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.873.000,00	0	18.778.900,00	0	18.778.900,00	94,49	1.094.100,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN								



*Catatan Atas Laporan Keuangan Disperkimtan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran	Penjelasan Singkat Atas Realisasi Pendapatan dan Belanja (Tidak Optimal, Melampaui Target, Kurang Optimal, Tidak Terealisasi)
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Total	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TANAH ABSENTEE								
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	96.986.000,00	0	95.170.000,00	0	95.170.000,00	98,13	1.816.000,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	112.827.000,00	0	109.148.219,00		109.148.219,00	96,74	3.678.781,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	169.206.000,00		64.312.600,00		64.312.600,00	38,01	104.893.400,00	Sub Kegiatan dilaksanakan kurang optimal sesuai target. dikarenakan adanya ketidakpastian anggaran yang tersedia pada BKAD dan Data terkait RTH oleh Dinas PUPR tidak tersedia serta waktu pelaksanaan penilaian objek tanah untuk RTH yang melampaui tahun anggaran berjalan
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	19.997.000,00		19.820.992,00		19.820.992,00	99,12	176.008,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	19.982.000,00		19.374.800,00		19.374.800,00	96,96	607.200,00	Sub Kegiatan dilaksanakan optimal sesuai target



2.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target dan Penyerapan Anggaran

Pada sub bab ini akan diuraikan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2024 dalam kaitannya pencapaian terhadap target pendapatan maupun penyerapan pagu anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan indikator kinerja yang diharapkan. Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut.

1. Beberapa kegiatan terlambat proses pelaksanaannya dikarenakan adanya perubahan lokasi pekerjaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
2. Tidak diterbitkannya SPD dikarenakan tidak tersedianya anggaran pada kas daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga proses penyerapan anggaran tidak maksimal. Hal ini menyebabkan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan penyesuaian terhadap sumber dana yang tersedia pada Kas Daerah.
3. Pembagian SPD yang dibatasi 20-30-30-20 persen yang menyebabkan tidak maksimalnya pengajuan pencairan dikarenakan alokasi tersebut dibagi per bidang sehingga untuk pencairan sekaligus harus menunggu triwulan berikutnya.
4. Pembagian SPD yang akan direalisasikan pada Triwulan IV tidak ada kepastian anggaran pada kas daerah sampai akhir Triwulan IV sehingga Dinas Perkimtan tidak berani melaksanakan kegiatan dimaksud dikarenakan kekhawatiran tidak dapat terbayarkan.



BAB III

PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

3.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*. *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Adapun *Official Assesment* merupakan Sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah.

3.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Realisasi Retribusi Jasa Umum



untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah atau kekayaan daerah. Realisasi Retribusi Jasa Usaha untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi perijinan tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

3.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 11.457.655.744,00 dan Rp 11.729.381.388,00

3.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 11.729.381.388 dan Rp 10.584.917.388

No	Uraian	Pagu TA 2024	Realisasi TA 2024	%
1	Belanja Pegawai	4.433.202.104,00	4.342.947.628,00	97,96
2	Belanja Barang Jasa	3.717.671.696,00	3.270.071.705,00	87,96
3	Belanja Bantuan Sosial	1.920.000.000,00	1.885.000.000,00	98,18



3.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 3.986.555.845,00 dan Rp 3.986.555.845,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.381.503.644,00	2.361.442.438,00	99,16	2.324.933.619
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.875.046.460,00	1.822.235.190,00	97,18	1.510.599.226
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan POL	176.652.000,00	159.270.000,00	90,16	151.023.000
4	Honorarium Non PNS				
	Jumlah	4.433.202.104,00	4.342.947.628,00	97,96	3.986.555.845

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 3.270.071.705,00 dan Rp 3.614.198.796,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	915.252.800,00	776.766.300,00	84,87	695.895.000
2	Belanja Jasa Kantor	584.154.360,00	537.758.496,00	92,06	628.420.693
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.680.536,00	8.172.895,00	76,52	2.525.308
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	0	0	0
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	0	0	0
6	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	104.000.000,00	68.180.000,00	65,56	98.500.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	143.110.000,00	122.501.000,00	85,60	160.140.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.500.000,00	45.756.000,00	98,40	38.736.000,00
8	Belanja Perjalanan Dinas	1.812.474.000,00	1.710.937.014,00	94,40	1.719.156.542
	Jumlah	3.717.671.696,00	3.270.071.705,00	87,96	3.614.198.796

3.1.2.1.3 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 1.8805.000.00,00 dan Rp 3.254.988.000 dengan rincian sebagai berikut.



No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	355.000.000,00	320.000.000,00	90,14	739.988.000
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.565.000.000,00	1.565.000.000,00	100,00	3.254.988.000
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga				
	Jumlah	1.920.000.000,00	1.885.000.000,00	98,18	3.254.988.000

3.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja atas pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 1.336.252.502,92 dan Rp 1.144.464.000,00.

3.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

3.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 751.680.000,00 dan Rp 1.066.552.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Angkutan	419.672.000,00	751.680.000,00	93,99	774.319.000
2	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	96,00	115.200.000
3	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	145.650.400,00	144.290.000,00	99,07	49.820.000
4	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	33.285.000
5	Belanja Modal Komputer	234.391.000,00	231.390.000,00	98,72	86.428.000
	Jumlah	799.713.400,00	751.680.000,00	93,99	1.066.552.000,00



3.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				0.000
	Jumlah				0.000

3.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 485.572.502,92 dan Rp 76.812.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	487.068.544,00	485.572.502,92	99,69	000
2.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,000		0	76.812.000
	Jumlah	487.068.544,00	485.572.502,92	99,69	76.812.000

3.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 1.100.000 dengan rincian sebagai berikut.

3.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 99.000.000,00,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai Berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	100.000.000,00	99.000.000,00	99,00	000
	Jumlah	100.000.000,00	99.000.000,00	99,00	0,00



3.2 PENJELASAN NERACA

3.2.1 Aset

Aset terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, aset lainnya. Jumlah aset per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 26.140.015.613,22 dan Rp 28.645.271.442,00.

3.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan. Jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 9.482.366,30 dan Rp 2.047.000,00.

3.2.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

3.2.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00.

3.2.1.1.4 Beban di bayar dimuka

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp 5.723.866,30 dan 2023 sebesar Rp 0,00. Beban dibayar dimuka ini adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor yang melampaui tahun pelaksanaan kegiatan.

3.2.1.1.5 Persediaan

Persediaan merupakan barang yang habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Organisasi. Jumlah Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 3.758.500,00 dan Rp 2.047.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	ATK	312.500,00	853.000,00
2	Kertas dan Cover	1.420.000,00	994.000,00
3	Bahan Cetak	2.026.000,00	200.000,00
4	Bahan Komputer	0,00	0,00



No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5	Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih		
6	Bahan Bakar Minyak/Gas		
7	Bahan Baku Bangunan		
8	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman		
9	Persediaan Bibit Ternak		
10	Bahan Obat-obatan		
11	Persediaan Bahan Kimia		
12	Persediaan Makanan Pokok		
13	Persediaan Bahan Pakan Ternak		
14	Persediaan Alat Kesehatan Habis pakai		
15	Persediaan Barang Yang Akan diberikan Kepada Pihak Ketiga		
	Jumlah	3.758.500,00	2.047.000,00

3.2.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 27.429.611.856,92 dan Rp 28.585.582.459,00.

3.2.1.3.1 Tanah

Jumlah Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 112.267.500,00 dan Rp 112.267.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Saldo aset tetap Tanah 31 Desember 2024 bertambah dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		112.267.500,00
2	Pertambahan		
	Pengadaan Tanah 2023	0,00	
	Temuan Aset yang belum tercatat		
	Hibah tanah dari Masyarakat	0,00	
	Koreksi	0,00	
	Jumlah Pertambahan		0,00
3	Pengurangan		
	Penghapusan	0,00	



No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		112.267.500,00

3.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 3.865.927.065,34 dan Rp 3.790.120.732,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024	2023
	Alat Angkutan	1.464.401.333,00	1.123.241.333,00
1	Alat Bengkel Bermesin/alat Ukur	404.263.000,00	427.289.000,00
	Alat Pertanian	17.500.000,00	17.500.000,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	959.997.872,00	1.273.623.872,00
3	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	88.350.000,00	130.135.000,00
4	Alat Laboratorium	92.000.000,00	92.000.000,00
5	Alat Persenjataan	15.000.000,00	15.000.000,00
6	Komputer	824.414.860,34	711.331.527,00
7	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit		
8	Belanja Modal Peralatan Komputer		
	Jumlah	3.865.927.065,34	3.790.120.732,00

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 bertambah dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		3.790.120.732,00
2	Pertambahan		
	Pengadaan Belanja Modal Tahun 2024	751.680.000,00	
	Mutasi antar SKPD	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Aset Yang Belum Tercatat	0,00	
	Koreksi Temuan Tindak Lanjut	0,00	
	Jumlah Pertambahan		751.680.000,00
3	Pengurangan		
	Penghapusan	0,00	



*Catatan Atas Laporan Keuangan Disperkimtan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023*

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Mutasi antar SKPD	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset Lain-lain	660.668.666,66	
	Pindah ke Extra Kompatabel	15.205.000,00	
	Mutasi antar SKPD	0,00	
	Jumlah Pengurangan		645.463.666,66
4	Saldo Akhir		3.865.927.065,34

***Mutasi Transaksi Penambahan nilai asset peralatan dan mesin berupa
Pembelian/Pengadaan dengan rincian sebagai berikut :***

62.07/04.0/000032/LS/1.04.2.10.0.00. 01.0000/M/4/2024	Belanja Modal Personal Computer	Rp	14.750.000,00
62.07/04.0/000053/LS/1.04.2.10.0.00. 01.0000/M/5/2024	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp	37.500.000,00
62.07/04.0/000054/LS/1.04.2.10.0.00. 01.0000/M/5/2024	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp	30.955.000,00
62.07/04.0/000056/LS/1.04.2.10.0.00. 01.0000/M/5/2024	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp	24.950.000,00
62.07/04.0/000067/LS/1.04.2.10.0.00. 01.0000/M/6/2024	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Sofa)	Rp	14.560.000,00
62.07/04.0/000103/LS/1.04.2.10.0.00. 01.0000/M/8/2024	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp	190.000.000,00
62.07/04.0/000143/LS/1.04.2.10.0.00. 01.0000/P4/9/2024	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp	186.000.000,00
62.07/04.0/000168/LS/1.04.2.10.0.00. 01.0000/PR/10/2024	Belanja Modal Peralatan Computer Lainnya (Printer)	Rp	9.840.000,00
62.07/04.0/000169/LS/1.04.2.10.0.00. 01.0000/PR/10/2024	Belanja Modal Personal Computer (Laptop)	Rp	36.690.000,00
62.07/04.0/000171/LS/1.04.2.10.0.00. 01.0000/PR/10/2024	Belanja Modal Personal Computer (Laptop dan PC)	Rp	67.850.000,00
14046/SP2D/LS/1.04.01/DAU/12/202 362.07/04.0/000172/LS/1.04.2.10.0.00. .01.0000/PR/10/2024	Belanja Modal Peralatan Computer Lainnya (Printer)	Rp	14.760.000,00
62.07/04.0/000196/LS/1.04.2.10.0.00. 01.0000/PR/11/2024	Pekerjaan Belanja Modal Personal Computer	Rp	14.850.000,00
62.07/04.0/000197/LS/1.04.2.10.0.00. 01.0000/PR/11/2024	Pekerjaan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Rp	34.500.000,00
62.07/04.0/000213/LS/1.04.2.10.0.00. 01.0000/PPR1/11/2024	Belanja Modal Mebel (Meja Kerja Staff)	Rp	26.775.000,00
62.07/04.0/000281/LS/1.04.2.10.0.00. 01.0000/PPR2/12/2024	Belanja Modal Personal Computer dan Belanja Modal Peralatan Komputer		47.700.000,00



3.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 5.621.681.174 dan Rp 5.621.681.174,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024	2023
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.223.101.174,00	5.223.101.174,00
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	98.930.000,00	98.930.000,00
3	Bangunan Menara		
4	Bangunan Bersejarah		
5	Tugu Peringatan	299.650.000,00	299.650.000,00
6	Monumen/Bangunan Bersejarah		
7	Tugu Peringatan Lain		
8	Tugu Titik Kontrol/Pasti		
9	Rambu-Rambu		
	Jumlah	5.621.681.174,00	5.621.681.174,00

Mutasi Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		5.621.681.174,00
2	Pertambahan		
	Pengadaan Belanja Modal Tahun 2022	0,00	
	Hibah	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Aset Yang Belum Tercatat	0,00	
	Utang kepada Pihak Ketiga	0,00	
	Jumlah Pertambahan		0,00
3	Pengurangan		
	Penghapusan	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	



*Catatan Atas Laporan Keuangan Disperkimtan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023*

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Pindah Ruang ke Ekstrakompatabel	0,00	
	Koreksi Aset	0,00	
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		5.621.681.174,00

3.2.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 39.706.060.228,92 dan Rp 37.749.647.800,00 dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Jalan	30.736.134.302,92	28.779.721.874,00
2	Jembatan	2.096.143.000,00	2.096.143.000,00
3	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.334.346.026,00	6.334.346.026,00
4	Bangunan Air Kotor	98.190.000,00	98.190.000,00
5	Instalasi Pembangkit Listrik	364.434.900,00	364.434.900,00
6	Jaringan Listrik	76.812.000,00	164.934.900,00
	Jumlah	39.706.060.228,92	37.749.647.800,00

Mutasi Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		37.749.647.800,00
2	Pertambahan		
	Pengadaan Belanja Modal Tahun 2024	485.572.502,92	
	Hibah	1.470.839.926,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Aset Yang Belum Tercatat	0,00	
	Jumlah Pertambahan		1.956.412.428,92
3	Pengurangan		
	Penghapusan	0,00	



*Catatan Atas Laporan Keuangan Disperkimtan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023*

	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset Tidak Berwujud	0,00	
	Koreksi Saldo Awal	0,00	
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		39.706.060.228,92

Mutasi Transaksi Penambahan nilai asset jalan, irigasi dan jaringan berupa Pembelian/Pengadaan dengan rincian sebagai berikut :

62.07/04.0/000149/LS/ 1.04.2.10.0.00.01.0000/P4/9/2024	Pembangunan 30 % Jalan Abadi Gang. Jama Kuala Pembuang II (Siring)	30.170.100,00
62.07/04.0/000150/LS/ 1.04.2.10.0.00.01.0000/P4/10/2024	Pembangunan 5% Jalan Abadi Gang. Jama Kuala Pembuang II (Siring)	5.028.350,00
62.07/04.0/000151/LS/ 1.04.2.10.0.00.01.0000/P4/10/2024	Pembangunan 95% Abadi Gang. Jama Kuala Pembuang II (Siring)	65.368.550,00
62.07/04.0/000159/LS/ 1.04.2.10.0.00.01.0000/P4/10/2024	Pembangunan 30% Jalan di Desa Sahabu Gang. H. Nawawi Kec. Batu Ampar	58.313.400,00
62.07/04.0/000160/LS/ 1.04.2.10.0.00.01.0000/P4/10/2024	Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Jalan Kasuma ke Jalan Batu Beliung Kecamatan Seruyan Tengah 30%	16.885.050,00
62.07/04.0/000188/LS/ 1.04.2.10.0.00.01.0000/PR/11/2024	Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Jalan Kasuma ke Jalan Batu Beliung Kec Seruyan Tengah 95%	36.584.275,00
62.07/04.0/000189/LS/ 1.04.2.10.0.00.01.0000/PR/11/2024	Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Jalan Kasuma ke Jalan Batu Beliung Kec. Seruyan Tengah 5%	2.814.175,00
62.07/04.0/000190/LS/ 1.04.2.10.0.00.01.0000/PR/11/2024	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sahabu Gang H. Nawawi Kecamatan Batu Ampar 5%	9.718.900,00
62.07/04.0/000191/LS/ 1.04.2.10.0.00.01.0000/PR/11/2024	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sahabu Gang H. Nawawi Kecamatan Batu Ampar 95%	126.345.700,00
62.07/04.0/000287/LS/ 1.04.2.10.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kel. Kuala Pembuang I 5%	6.717.200,15
62.07/04.0/000285/LS/ 1.04.2.10.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kel. Kuala Pembuang I dan Sekitarnya 95%	127.626.802,77



3.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 3.658.897.450 dan Rp 3.658.897.450 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Buku Ilmu Sosial	1.100.000,00	1.100.000,00
2	Buku Laporan	3.657.797.450,00	3.657.797.450,00
3	Barang-Barang Perpustakaan		
4	Peta		
5	Database		
6	Barang Bercorak Kebudayaan		
7	Alat Olah Raga Lainnya		
8	Hewan		
9	Materplan/Study/Perekayasaan		
	Jumlah	3.658.897.450,00	3.658.897.450,00

Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah(Rp)
1	Saldo Awal		3.658.897.450,00
2	Pertambahan		
	Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023	0,00	
	Hibah	0,00	
	Reklas / pindah Ruang pencatatan KIB B	0,00	
	Temuan Aset yang belum tercatat	0,00	
	Jumlah Pertambahan		0,00
3	Pengurangan		
	Penghapusan	0,00	
	Reklas / pindah Ruang pencatatan KIB A	0,00	
	Reklas / pindah Ruang pencatatan KIB B	0,00	
	Reklas / pindah Ruang pencatatan KIB C	0,00	
	Pindah ke ekstrak kompatabel	0,00	
	Hibah	0,00	
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		3.658.897.450,00



3.2.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 1.372.985.916,00 dan Rp 1.372.985.916,00.

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		1.372.985.916,00
2	Pertambahan		
	Reklas / pindah Ruang pencatatan KIB C	0,00	
	Reklas / pindah Ruang pencatatan KIB D	0,00	
	Utang pengadaan Aset Tetap	0,00	
	Jumlah Pertambahan		0,00
3	Pengurangan		
	Reklas / pindah Ruang pencatatan KIB C	0,00	
	Reklas / pindah Ruang pencatatan KIB D	0,00	
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		1.372.985.916,00

3.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Seruyan dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 26.908.207.477,34 dan Rp . 23.705.018.113,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	20252 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1.988.048.659,34	2.239.526.503,00
2	Gedung dan Bangunan	1.010.375.751,00	904.240.251,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.909.783.067,00	20.561.251.359,00
	Jumlah	26.908.207.477,34	23.705.018.113,00



Saldo Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 berasal dari penambahan dan pengurangan penyusutan di tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		23.705.018.113,00
	Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.239.526.503,00	
	Penyusutan Gedung dan bangunan	904.240.251,00	
	Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.561.251.359,00	
2	Pertambahan		
	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	409.946.490,00	
	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	106.135.500,00	
	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.347.531.708,00	
	Reklas pindah ruang	0,00	
	Koreksi Penyusutan	0,00	
	Jumlah Pertambahan		3.863.613.698,00
3	Pengurangan		
	Penghapusan	0,00	
	Penghapusan karena Hibah	0,00	
	Reklas Pindah Ruang	660.424.333,66	
	Koreksi penyusutan	0,00	
	Jumlah Pengurangan		660.424.333,66
4	Saldo Akhir		26.908.207.477,34

3.2.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Aset Tidak Berwujud, dan AsetLain-lain. Jumlah aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 148.306.316,00dan Rp 57.641.983. dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud (Kajian)	99.000.000,00	0,00
2	Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat)	848.567.416,66	1.431.793.500,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(330.000,00)	
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(798.931.100,66)	(1.374.151.517,00)
	Jumlah	148.306.316,00	57.641.983,00



3.2.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembebanan. Jumlah Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

3.2.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

Jumlah Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 99.000.000,00 Rp 0,00.

3.2.1.4.3 Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset yang rusak berat, jumlah aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 848.567.416,66 dan Rp 1.431.793.500,00. Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		1.431.793.500,00
2	Pertambahan		
	Koreksi Aset	0,00	
	Reklas (Aset Kondisi Rusak Berat, Dalam Penulusuran dan sebab Lainnya)	660.668.666,66	
	Jumlah Pertambahan		660.668.666,66
3	Pengurangan		
	Penghapusan	848.567.416,660	
	Reklas	0,00	
	Jumlah Pengurangan		1.045.644.500,00
	Saldo Akhir (Nilai Perolehan)		1.046.817.666,66
	Jumlah Penyusutan		997.181.350,66

3.2.2 Kewajiban

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 699.050,00 dan Rp 396.545,00 .

3.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Beban Yang Masih Harus Dibayar, dan Utang Jangka



Pendek Lainnya. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 699.050,00 dan Rp 396.545,00.

3.2.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

3.2.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 bersumber dari wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu sewa rumah dinas.

3.2.2.1.3 Utang Belanja

Jumlah Utang Beban per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 699.050,00 dan Rp 396.545,00 dengan rincian sebagai berikut

No	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Utang Beban Pegawai		
2	Utang Beban Barang dan Jasa	699.050,00	396.545,00
	Jumlah	699.050,00	396.545,00

3.2.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

3.2.3 Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 27.586.701.489,22 dan Rp 28.659.874.897.



3.3 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

3.3.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO.

Realisasi Pendapatan - LO untuk Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 1.470.839.926,00 dan Rp 0,00.

3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

3.3.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

3.3.1.1.2 Pendapatan Hibah-LO

Realisasi PendapatanRetribusi Daerah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 1.470.839.926,00 dan Rp 0,00

3.3.2 Beban

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban terdiri dari Beban Operasional dan Beban Transfer. Jumlah Beban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 13.370.035.169,70 dan Rp 14.328.633.680.

3.3.2.1 Beban Operasional

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban Penyisihan Piutang.

Jumlah Beban Operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 9.506.091.471,70 dan Rp 10.586.689.683,00



3.3.2.1.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 4.342.947.628,00 dan Rp 3.986.555.845 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	2.361.442.438,00	2.324.933.619,00
2	Beban Tambahan Penghasilan	1.822.235.190,00	1.510.599.226,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	159.270.000,00	151.023.000,00
4	Beban Honorarium Non PNS	0,00	0,00
5	Beban Hutang Pegawai Tahun ini	0,00	0,00
6	Beban Hutang Pegawai Tahun sebelumnya	0,00	0,00
	Jumlah	4.342.947.628,00	3.986.555.845,00

3.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 3.278.143.843,70 dan Rp 3.345.145.838,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Barang	790.259.800,00	696.317.000,00
2	Beban Persediaan Bahan/ Material		
3	Beban Jasa Kantor	608.690.029,70	730.796.296,00
4	Beban Premi Asuransi/iuran jaminan		
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		
6	Beban Cetak dan Penggandaan		
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas		
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
10	Beban Makanan dan Minuman		
11	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya		
12	Beban Pakaian Kerja		
13	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		
14	Beban Perjalanan Dinas	1.710.937.014,00	1.719.156.542,00
15	Beban Perjalanan Pindah Tugas		
16	Beban Pemeliharaan	168.257.000,00	198.876.000,00



No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
17	Beban Jasa Konsultasi		
18	Beban Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
	Jumlah	3.278.143.843,70	3.345.145.838,00

3.3.2.1.3 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 1.885.000.000,00 dan Rp 3.254.988.000 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2023 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	320.000.000,00	739.988.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	1.565.000.000,00	2.515.000.000,00
	Jumlah	1.885.000.000,00	3.254.988.000,00

3.3.2.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 3.741.943.997,00 dan Rp 3.741.943.997,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	409.946.490,00	279.874.301,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	106.135.500,00	106.135.500,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.347.531.708,00	3.355.934.196,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	330.000,00	
	Jumlah	3.863.943.698,00	3.741.943.997,00

3.3.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

3.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp 0,00) dan (Rp 0,00).



3.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

3.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah Rp 28.659.874.897,00.

3.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar (Rp 11.899.195.243,70)

3.4.3 RK PPKD

RK PPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 10.834.271.835,92 dan untuk tahun 2023 Rp 11.729.381.388,00.

3.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdiri dari koreksi nilai asset tetap senilai Rp (0,00) dengan rincian sebagai berikut.

3.4.5 LAIN-LAIN

Akun lain lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp 8.250.000)

3.4.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah Rp 27.586.701.489,22.



BAB IV

INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Gambaran Organisasi

a. Kedudukan Organisasi (Perda/Perkada Pendirian SKPD)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Seruyan maka Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Seruyan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbag Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Subbag Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
- c. Bidang Perumahan, terdiri dari:
- d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
- e. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dapat di gambarkan sebagai berikut :

KEPALA DINAS

1. Kepala Dinas Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman



dan Pertanahan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas;

2. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sbagai berikut :
 - a) perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
 - b) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - c) pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - d) penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan;
 - e) pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

SEKRETARIAT

A. Sekretaris

1. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja sekretariat;
 - b) pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
 - c) pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;
 - d) pengoordinasian administrasi barang milik daerah Dinas;
 - e) pengoordinasian administrasi kepegawaian Dinas ;
 - f) pengoordinasian administrasi umum Dinas
 - g) pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas
 - h) pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas;
 - i) pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
 - j) penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - k) pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan



B. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
2. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b) melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
 - c) melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
 - d) melaksanakan pengoordinasian dan Menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
 - e) melaksanakan pengoordinasian dan Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
 - f) menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
 - g) melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
 - h) menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan;
 - i) melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
 - j) Menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat;

C. Kepala Sub Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.;
2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut::
 - a) merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b) melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
 - c) melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
 - d) melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
 - e) melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - f) menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai
 - g) dan prestasi kerja bawahan; dan,;
 - h) melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan



BIDANG PERUMAHAN

A. Kepala Bidang Perumahan

1. Bidang Perumahan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Pendataan dan Persiapan Penyediaan/ Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, penataan dan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan program kerja/kegiatan Bidang Perumahan melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) pelaksanaan Pendataan terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi;
 - c) pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - d) pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program;
 - e) Pengawasan pelaksana kebijakan dan strategi nasional pada tingkat Kabupaten di bidang Perumahan;
 - f) Penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten penyediaan rumah backlog dan perumahan;
 - g) Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan;
 - h) Penyediaan fasilitas pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan pada tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa;
 - i) Penyediaan fasilitas perumahan bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Kawasan Kumuh.
 - j) Penyediaan fasilitas pelaksanaan kebijakan dan strategis pada tingkat kabupaten; dan
 - k) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.



BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN

A. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman

1. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian kumuh dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat Kabupaten di bidang kawasan permukiman kumuh dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - b) melaksanakan Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha;
 - c) melaksanakan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) ha ;
 - d) melaksanakan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota; dan;
 - e) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan

BIDANG PERTANAHAN

A. Kepala Bidang Pertanahan

1. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dalam urusan pengelolaan dan penatagunaan tanah, pemanfaatan dan pemetaan serta pengendalian pertanahan
2. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan rencana teknis dan program di bidang pertanahan;
 - b) pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi atas Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - c) penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten;
 - d) penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - e) pelaksanaan Inventarisasi dan Koordinasi Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 Daerah Kabupaten;
 - f) pelaksanaan Inventarisasi dan Koordinasi Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten;



- g) pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Serta Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
- h) pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Izin Membuka Tanah serta Pengendalian Pemanfaatan tanah negara
- i) pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam 1 Daerah Kabupaten; dan.
- j) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

d. Sumber Daya Manusia

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan didukung 65 orang, terdiri 35 orang PNS, 30 orang PTT. Keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel - tabel berikut :

Keadaan PNS dan PTT tahun 2023

No	Pendidikan	PNS Golongan				PTT	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2			1	3		4
2.	S1			14	4	7	25
3.	Akademi/D3		3	1		3	7
4.	D2						
5.	SLTA		6	3		15	25
6.	SLTP	2				-	2
7.	SD					5	5
JUMLAH		2	8	18	7	30	66

Keadaan PNS menurut Pangkat Golongan

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1.	Pembina (Golongan IV.c)	1
2.	Pembina Tk I (Golongan IV.b)	1
3.	Pembina (Golongan IV.a)	4
4.	Penata Tk. I (Golongan III.d)	6
5.	Penata (Golongan III.c)	2
6.	Penata Muda Tk. I (Golongan III.b)	2



7.	Penata Muda (Golongan III.a)	10
8.	Pengatur Tk I (Golongan II.d)	4
9.	Pengatur (Golongan II.c)	4
10.	Pengatur Muda Tk. I (Golongan II.b)	1
11.	Pengatur Muda (Golongan II.a)	0
12.	Juru Tingkat I (Golongan I/d)	1
Jumlah		36

Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon

No	Bidang Tugas	Esselon			Pelak sana	PTT	Jml
		II	III	IV			
1.	Kepala Dinas	1	-		-	-	1
2.	Sekretariat		1	2	6	16	25
3.	Bidang Perumahan		1		6	4	11
4.	Bidang Kawasan Pemukiman		1		9	5	15
5	Bidang Pertanahan		1		8	5	14
Jumlah		1	4	2	29	30	66

e. Isu Strategis yang berpengaruh terhadap kinerja SKPD

Isu Strategis terkait Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan , dapat di analisis melalui bidang yang ada yaitu :

1. Bidang Perumahan

- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan terjangkau;
- Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan perumahan akibat Bencana dan dampak Relokasi akibat Kebijakan Pemerintah Daerah.

2. Bidang Kawasan Permukiman

- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
- Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan permukiman kumuh untuk fasilitas penanganan kawasan kumuh;
- Lemahnya penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan.



3. Bidang Pertanahan

- a) Kurang tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan;
- b) Belum optimalnya sertifikasi tanah aset Pemda;
- c) Kurangnya data kebutuhan dan ketersediaan tanah;
- d) Kurangnya pemahaman aparaturnya tentang hukum pertanahan;
- e) Banyaknya permasalahan pertanahan;
- f) Dalam hal pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan bersamaan dengan kegiatan pengadaan tanah.
- g) Terbatasnya pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)
- h) Tidak ada database Ruang Terbuka Hijau hingga keperdesaan.
- i) Belum adanya data lahan pemukiman umum.

Pada Renstra PD dilakukan telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi PD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan PD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

4.2 Indikator Kinerja

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sementara indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Bab ini memuat indikator kinerja PD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan PD yang



ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan periode 2018-2023 merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah disajikan pada Tabel dibawah ini :

**Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 204-2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
Rasio rumah layak huni	%	53,90	57,50	57,68	62,50	62,50
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	87,00	88,50	90,00	92,00	92,00
Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	20,00	19,58	19,45	19,17	19,17
Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai rencana aksi	%	100	100	100	100	100
Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun/direlokasi sesuai rencana aksi	%	100	100	100	100	100
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	80	81,97	83,34	85,55	85,55
Persentase penyelesaian izin lokasi	%	N/a	85	90	90	90
Persentase luas lahan bersertifikat	%	5	5	5,20	5,50	5,50
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	poin	51,10	55,00	58,00	60,00	60,00



4.3 Program/Kegiatan

Berdasarkan Visi-Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, serta Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan, diperoleh strategis untuk mencapainya yaitu melalui 08 (delapan) Program Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Bidang Kawasan Permukiman, serta Bidang Pertanahan. Dan 01 (satu) Program Non Urusan. Kedelapan program tersebut merupakan urusan wajib yang meliputi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan terdiri dari kegiatan
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - c. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
2. Program Kawasan Permukiman terdiri dari
 - a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terdiri dari :
 - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan terdiri dari :
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Penatagunaan Tanah terdiri dari :
 - a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.
7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dari :
 - a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Kegiatan redistribusi Tanah, serta ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan maksimum dan tanah abstentee terdiri dari :
 - a. Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota.

Sedangkan 01 (satu) Program Non Urusan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari :



- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



BAB V PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas;
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan dan sekaligus sebagai bahan untuk dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Pembuang, 25 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan


ABDUL RAJAK, S.Pi., M.M
NIP. 19720513 200604 1 020